



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK - 3/DPRD/4/2026

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Dengan Surat Pengantar Nomor :B-749/TAPEM/100.1.6/03/2026 Tanggal 30 Maret Tahun 2026 Tentang Penyampaian LKPJ Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke - 7 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 April 2026 dipandang perlu untuk menyampaikan Rekomendasi kepada Bupati Kutai Kartanegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut di atas, untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 20);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Ke - 7 Masa Sidang II, Hari Senin Tanggal 27 April 2026 dengan Acara

1. Laporan Dan Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dan Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 27 April 2026


**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di - Jakarta
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di - Jakarta
5. Arsip.

TELAH DIKETAHUI DAN TELAH DIKOREKSI OLEH :

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lukman, S.Sos., M.Si	Plt. Sekretaris Dewan	
2.	Nurhayati Touristinay,S.Sos.	Kabag. Persidangan Dan PUU	
3.	Deny Afriansyah,SH.,MH.	JF. Perancang PUU	



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025

Nomor : 170/SK – 3/DPRD/4/2026

Tanggal : 27 April 2026

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Adapun LKPJ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2025 disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H. Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 31 Maret 2026.

Berdasarkan hal tersebut DPRD melakukan pembahasan LKPJ Dengan memperhatikan:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Atas hasil pembahasan sebagaimana dimaksud DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

II. Rekomendasi DPRD

Terhadap LKPJ Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, secara umum DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berpendapat bahwa pelaksanaan



pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. Namun perlu diperhatikan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu perlu direkomendasikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan APBD

Bahwa dalam pada tahun anggaran 2025 terdapat perubahan APBD yang sangat signifikan, antara lain disebabkan oleh:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- c. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 berkaitan dengan Koperasi Merah Putih.

Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan yang menurun yang berakibat pada kemampuan belanja pelayanan publik dan belanja pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa APBD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ketergantungan yang signifikan dari dana transfer dari pemerintah pusat. Khususnya Dana Bagi Hasil yang sampai tahun anggaran 2026 saat ini berdasarkan perhitungan Pemerintah Pusat belum menyalurkan Dana Bagi hasil mencapai Rp 3 Triliun (Tiga Triliun Rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah daerah perlu bersama dengan pemerintah daerah lain berjuang dengan tanpa henti agar pemerintah pusat segera menyalurkan hak daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rekomendasi DPRD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- b. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- c. Pelaksanaan Urusan Pilihan
- d. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah
- e. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan
- f. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

Adapun Rekomendasi DPRD dirincikan berdasarkan Urusan Pemerintahan dengan OPD Pelaksana dan berdasarkan Permasalahan Pokok Yang dihadapi oleh perangkat daerah yang terkait.



2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
1.	Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak sekolah yang kekurangan gedung RKB 2. Terdapat 510 tanah/lahan sekolah yang belum bersertifikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu nya analisis kebutuhan RKB, agar dapat diadakan RKB ditahun berikutnya 2. Perlu nya Koordinasi dengan instansi terkait agar dapat dilakukan percepatan untuk penerbitan sertifikat. <p>Pemerintah daerah harus segera menyelesaikan legalitas ini untuk menghindari sengketa hukum dan agar sekolah-sekolah tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan program revitalisasi</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kekurangan tenaga pengajar dan kepala sekolah, banyak kepala sekolah dijabat oleh Pelaksana Tugas dan bahkan menjabat kepala sekolah lebih dari satu sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan evaluasi terhadap masa jabatan Kepala Sekolah sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 (maksimal 2 periode), mengingat masih terdapat 29 kepala sekolah yang menjabat lebih dari 4 periode dan 185 posisi yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Terdapat beberapa sekolah yang tidak maksimal dalam perkembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendukung kajian potensi merger bagi sekolah-sekolah yang lokasinya



	3. Penataan kawasan permukiman kumuh belum optimal	3. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Belum Optimal Pemerintah daerah agar mengoptimalkan penataan kawasan permukiman kumuh melalui program terpadu berbasis kawasan yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
No Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)	Kebutuhan dukungan operasional dan SDM untuk menjaga ketertiban umum, keterbatasan jangkauan sosialisasi, dan kebutuhan peningkatan peran di sekolah serta komunitas.	Perkuat anggaran operasional dan program sosialisasi Satpol PP di sekolah dan komunitas, tingkatkan sarana prasarana penunjang tugas lapangan, dan koordinasikan program penerbitan lintas-OPD agar Satpol PP memiliki dukungan kelembagaan yang memadai.

2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
1 Tenaga Kerja (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	Tingginya angka pengangguran terbuka, ketimpangan akses pelatihan antar wilayah, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola	Fokuskan pelatihan pada kebutuhan industri prioritas, wajibkan komitmen penyerapan dari perusahaan peserta job fair, kembangkan mekanisme



		ketenagakerjaan, dan lemahnya mekanisme penempatan pasca-pelatihan.	pendampingan pasca-pelatihan hingga penempatan kerja atau wirausaha, dan terapkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketenagakerjaan.
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
2	Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	<p>1. Ketahanan Pangan Belum Stabil Ketersediaan pangan daerah belum sepenuhnya stabil sepanjang tahun, terutama pada komoditas tertentu yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.</p> <p>2. Fluktuasi Harga Pangan Harga bahan pangan pokok cenderung berfluktuasi, terutama saat hari besar keagamaan atau gangguan distribusi, yang berdampak pada daya beli masyarakat</p> <p>3. Pemanfaatan Pangan Lokal Potensi pangan lokal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alternatif sumber pangan, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.</p>	<p>1. Ketahanan Pangan Belum Stabil Pemerintah daerah agar memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengendalian distribusi untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.</p> <p>2. Fluktuasi Harga Pangan Pemerintah daerah agar menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan sistem distribusi, operasi pasar, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian inflasi daerah</p> <p>3. Pemanfaatan Pangan Lokal Pemerintah daerah agar mendorong optimalisasi pemanfaatan pangan lokal melalui peningkatan produksi, diversifikasi konsumsi, serta kampanye penggunaan pangan lokal sebagai alternatif yang berkelanjutan.</p>



No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
3	Pertanahan (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang)	Ketidakjelasan status lahan dan sengketa (termasuk lahan transmigrasi dan lahan yang masuk konsesi), serta kekurangan anggaran untuk pembebasan lahan strategis seperti akses pelabuhan dan relokasi desa.	Percepat sosialisasi status lahan kepada masyarakat, intensifkan koordinasi dengan provinsi untuk perubahan status kawasan, susun prioritas pembebasan lahan dan rencana pendanaan, serta ajukan dukungan legislatif untuk menutupi kekurangan pembiayaan pada kasus mendesak.
4	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana) Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	Pengelolaan sampah terkendala lahan TPA, tingkat pemilahan sampah rendah, kebutuhan pendanaan untuk operasional dan BLUD laboratorium, serta temuan lingkungan yang memerlukan penegakan dan pembinaan perusahaan.	Segera amankan lahan TPA yang memenuhi standar sanitary landfill, perkuat pembinaan dan insentif bagi pengurus bank sampah, aktifkan BLUD laboratorium sebagai sumber PAD, dan tingkatkan pengawasan serta penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan.
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendala logistik seperti ketersediaan blanko/ribbon, dan hambatan jaringan di wilayah pedalaman yang mengganggu	Perkuat logistik dengan pengadaan blanko/ribbon yang memadai, perluas layanan cetak di kecamatan untuk



	(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)	layanan kependudukan	mempercepat layanan, dan alokasikan anggaran prioritas untuk menjaga kelancaran layanan sehingga waktu penyelesaian dokumen tetap singkat dan akses layanan merata.
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Serapan program desa tidak merata, beberapa program (mis. peningkatan kerja sama desa) rendah serapannya, kebutuhan air bersih di desa terpencil belum terpenuhi, dan risiko SILPA akibat realisasi akhir tahun	Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program berserapan rendah dan perbaiki perencanaan, perkuat pengawasan penyerapan ADD/DD untuk mengurangi SILPA, prioritaskan penyediaan air bersih untuk desa kritis seperti Desa Sedulang, dan rencanakan alokasi anggaran pemekaran desa yang realistis serta terjadwal.
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
7	Perhubungan (Dinas Perhubungan)	Sebagai wilayah yang dilintasi banyak sungai, transportasi air belum dikelola secara optimal. Dermaga, kapal penyeberangan, Rambu-rambu dan fasilitas keselamatan masih perlu ditingkatkan.	Pemerintah daerah agar mengoptimalkan pengelolaan transportasi sungai melalui peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan (dermaga, kapal, rambu navigasi, dan fasilitas keselamatan), serta penguatan manajemen operasional guna menjamin konektivitas dan keselamatan transportasi air secara berkelanjutan.



No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
8	Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak wilayah penduduk yang blankspot jaringan internet, sedangkan kita sudah hidup di era teknologi informasi 2. banyak Smart Pole (Tiang Pintar) tidak berfungsi dengan baik, beberapa diakibatkan oleh gangguan kabel terputus oleh proyek galian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Diskominfo mencari jalan keluar untuk wilayah yang masih terkendala jaringan, misal dengan membangun tower dll 2. Smart Pole (Tiang Pintar) dan Videotron milik pemerintah daerah agar bisa di komersilkan, baik kepada pihak ketiga atau kepada OPD lain yang membutuhkan sarana untuk iklan layanan masyarakat.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi Publikasi Media Pers yang sudah terlalu banyak dan anggaran yang cukup besar 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlu diterbitkan dan di tata dengan baik, serta buat peraturan bupati untuk standarisasi media pers sesuai dengan UU Pers
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)	Masih terdapat disparitas dalam adopsi teknologi digital pada pelaku UMKM; realisasi pemberian NIB dan sertifikasi produk masih perlu ditingkatkan cakupannya	Mengintensifkan program pelatihan literasi digital, mempercepat pendampingan pengurusan legalitas (NIB/PIRT) secara jempit bola, dan mengkurasi produk lokal agar layak masuk pasar ritel modern/ekspor



No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
10 Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		1. Investasi sector ekonomi sekunder sekunder masih rendah yang mana di tahun 2025 hanya sebesar 2,1% 2. Terdapat Perubahan Regulasi yang menghambat pelaku usaha dalam berinvestasi baru maupun mengembangkan investasi yang sudah berjalan 3. Infrastruktur Pendukung Seperti jalan, Pelabuhan ketersediaan listrik, air bersih, serta jaringan Telekomunikasi yang belum sepenuhnya memadai di beberapa wilayah masih menjadi kendala Operasional Perusahaan 4. Progres perwujudan Sentra industri dan kawasan industri masih lambat	1. Perlu upaya dan langkah tepat untuk meningkatkan nilai investasi di bidang Sekunder salah satu upaya agar mendorong industri seperti industri Makanan, Farmasi, dan alat transportasi dan industri sekunder lainnya. 2. Pemerintah perlu melakukan peninjauan rutin terhadap peraturan yang sudah tidak relevan dan menghambat, serta melakukan sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah 3. Perbaiki perencanaan pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong iklim investasi yang lebih kompetitif. 4. Perlu dilakukan percepatan pembangunan kawasan industri dilakukan melalui pengembangan ekosistem terintegrasi (infrastruktur fisik & digital, perumahan pekerja, energi)



No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
11	Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga pada TA 2025 menghadapi hambatan struktural berupa instabilitas anggaran akibat kebijakan rasionalisasi oleh TAPD di akhir tahun, yang berimplikasi pada sejumlah program kerja di tingkat kabupaten maupun kecamatan.	Memperkuat koordinasi perencanaan antara OPD terkait dengan otoritas kecamatan guna memastikan usulan program kepemudaan dari tingkat akar rumput (desa/keurahan) memiliki prioritas yang terlindungi dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
12	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana) Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Kurang maksimalnya fasilitasi kegiatan bidang kebudayaan oleh dinas pendidikan	Perlu dibuatkan kajian untuk pemisahan bidang kebudayaan menjadi dinas tersendiri
13	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana) Kesra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun anggaran 2025 terdapat beberapa lembaga yang sudah tanda tangan NPHD namun dikarenakan kendala dana sehingga tidak sempat tersalurkan dana hibah 2. Bantuan Pendidikan meliputi Sarjana, SMA/SMK, Santri dan Beasiswa Kerjasama, tahun anggaran 2025 sempat menimbulkan polemik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah yang tidak sempat tersalurkan agar bisa terakomodir di Tahun Anggaran 2026 2. untuk Bantuan Pendidikan tahun anggaran 2026 sebelum diumumkan kepada masyarakat, harus dirembuk terlebih dahulu dengan melibatkan banyak stakeholder terkait termasuk



			<p>3. Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong yang statusnya merupakan masjid kabupaten kurang terawat</p>	<p>3. DPRD Kutai Kartanegara, agar tidak lagi menimbulkan masalah dikemudian hari.</p> <p>3. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya perawatan terhadap Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman, karena ini menjadi citra kurang baik bagi Kutai Kartanegara</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
1	Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan Dan Perikanan)	<p>1. Produktivitas Perikanan yang Belum Optimal</p> <p>Produksi perikanan tangkap dan budidaya masih belum mencapai potensi maksimal akibat keterbatasan teknologi</p>	<p>1. Produktivitas Perikanan yang Belum Optimal</p> <p>Pemerintah daerah agar meningkatkan produktivitas perikanan melalui penerapan teknologi tangkap dan budidaya yang tepat guna serta dukungan pendampingan teknis kepada nelayan dan pembudidaya.</p> <p>2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana</p> <p>Pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perikanan seperti pelabuhan, TPI, cold storage, dan infrastruktur pendukung lainnya secara bertahap dan merata.</p>
		<p>2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana</p> <p>Fasilitas seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, serta infrastruktur pendukung lainnya belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas.</p>	



	<p>3. Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya yang Masih Rendah Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan masih fluktuatif.</p>	<p>3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perikanan seperti pelabuhan, TPI, cold storage, dan infrastruktur pendukung lainnya secara bertahap dan merata.</p>
	<p>4. Rendahnya Nilai Tambah Produk Perikanan. Sebagian besar hasil perikanan dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya belum optimal. Pengolahan hasil perikanan masih terbatas.</p>	<p>4. Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya yang Masih Rendah Pemerintah daerah agar meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya melalui stabilisasi harga, kemudahan akses permodalan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.</p>
	<p>5. Kurangnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan Kapasitas sumber daya manusia, baik nelayan maupun pembudidaya, masih perlu ditingkatkan dalam hal manajemen usaha, teknologi, dan praktik berkelanjutan.</p>	<p>5. Rendahnya Nilai Tambah Produk Perikanan Pemerintah daerah agar mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan diversifikasi produk guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.</p>
	<p>6. Kurangnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan Kapasitas sumber daya manusia, baik nelayan maupun pembudidaya, masih perlu ditingkatkan dalam hal manajemen usaha, teknologi, dan</p>	<p>6. Kurangnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan Pemerintah daerah agar meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan berkelanjutan dalam aspek teknologi,</p>



		praktik berkelanjutan.	manajemen usaha, dan praktik berkelanjutan.
		7. Pengelolaan Sumber Daya yang Belum Berkelanjutan Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan masih terjadi, sehingga berpotensi merusak stok ikan dan ekosistem.	7. Pengelolaan Sumber Daya yang Belum Berkelanjutan Pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan dan penerapan praktik perikanan berkelanjutan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan.
	No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Rekomendasi DPRD
2	Pariwisata (Dinas Pariwisata)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur sarana dan prasarana destinasi wisata yang belum optimal Destinasi wisata yang ada tidak terpelihara dengan baik, sehingga para wisatawan nasional maupun Mancanegara kurang minat untuk berwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Pendapatan Asli Daerah di bidang Pariwisata Masih rendah 3. Terdapat Objek Destinasi Wisata di beberapa destinasi perlu masuk ke dalam Lokus Renja Tahun 2026 4. Branding "Kukar Asia Wonders" belum sepenuhnya terkonversi menjadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pemeliharaan Sarana Prasarana khususnya objek destinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar memprioritaskan anggaran pemeliharaan Sarana Prasarana, 2. Peningkatan PAD Melalui Kerjasama dengan Mitra, Perusahaan dan masyarakat setempat. 3. Identifikasi Objek dan destinasi yang menguntungkan dimasukkan ke dalam RKPD 2027 4. Menyeimbangkan kampanye digital dengan peningkatan kualitas amenities (fasilitas) di lokasi wisata, melibatkan



		peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan di destinasi prioritas;	komunitas lokal/Pokdarwis secara aktif dalam pengelolaan destinasi agar berkelanjutan
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
3	Pertanian (Dimas Pertanian Dan Peternakan)	<p>1. Produktivitas Pertanian Belum Optimal Hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan masih belum maksimal akibat keterbatasan teknologi, penggunaan benih unggul yang belum merata, serta praktik budidaya yang masih tradisional.</p> <p>2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Terjadi pengurangan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi ke sektor lain seperti pertambangan, perumukiman, dan industri, yang berdampak pada penurunan luas tanam.</p> <p>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan alat mesin pertanian (alsintan) masih terbatas atau belum merata.</p>	<p>1. Produktivitas Pertanian Belum Optimal Pemerintah daerah agar meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul, serta pendampingan intensif kepada petani dalam praktik budidaya yang lebih efektif.</p> <p>2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pemerintah daerah agar memperkuat pengendalian alih fungsi lahan melalui penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) guna menjaga ketersediaan lahan produktif.</p> <p>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana prasarana pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, serta alat mesin pertanian untuk mendukung kelancaran produksi.</p>



		<p>2. Belum optimalnya pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan penting</p>	<p>2. Pengawasan harga melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis pemantauan real-time, peningkatan kapasitas dan intensitas pengawasan lapangan, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Selain itu, perlu dilakukan intervensi kebijakan secara terukur seperti operasi pasar, penetapan harga acuan, serta penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan spekulasi</p>
		<p>3. Rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</p>	<p>3. peningkatan kualitas dan daya saing produk melalui standarisasi dan sertifikasi, penguatan branding dan promosi produk lokal, serta perluasan akses pasar baik melalui pengadaan pemerintah maupun platform digital. Selain itu, perlu didorong kebijakan afirmatif untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta kampanye masif guna membangun kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal</p>
		<p>4. Fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan tantangan dalam</p>	<p>4. Meningkatkan frekuensi operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga, serta</p>



		menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri lokal	membangun ekosistem rantai pasok lokal agar industri kecil mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
6	Perindustrian (Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)	<ol style="list-style-type: none"> Masih belum aktifnya sentra IKM (industry kecil Menengah) berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas. Sulitnya pengendalian dan pemantauan izin usaha industri yang jujur dan sesuai dengan realitas 	<ol style="list-style-type: none"> diperlukan langkah strategis berupa penguatan rantai pasok melalui kemitraan dengan petani, optimalisasi dan pengelolaan profesional sentra IKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan, serta pengembangan produk hilir yang memiliki nilai tambah dan daya saing penguatan sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas dan jumlah SDM pengawas, serta penerapan mekanisme verifikasi dan validasi data secara berkala melalui monitoring lapangan. Di samping itu, perlu didorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha melalui kewajiban pelaporan yang konsisten dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran.



2.4. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
	Inspektorat Daerah	Realisasi anggaran dan kapasitas pengawasan perlu penguatan; pengelolaan dana di tingkat RT (program 150 juta per RT) berisiko tanpa pendampingan; serapan anggaran Inspektorat relatif rendah.	Perkuat pembinaan dan asistensi kepada Ketua/ Pengurus RT untuk pengelolaan anggaran RT, prioritaskan anggaran untuk fungsi quality assurance dan anti-korupsi, dan tetapkan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang transparan dan terukur.

2.5. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
1	Keuangan (Badan Pendapatan Daerah)	Realisasi target PAD belum mencapai ekspektasi optimal; terdapat kesenjangan antara potensi pajak riil dengan data wajib pajak yang terdaftar	Mendorong BAPENDA untuk melakukan tax mapping (pemetaan pajak) ulang, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, dan melakukan pendataan aktif untuk objek pajak baru guna menutup celah kebocoran pendapatan.
No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD



2	Pendidikan Dan Pelatihan (BKSDM)	Tekanan efisiensi anggaran mengurangi ruang pelatihan dan pengembangan SDM, masih bergantung pada narasumber eksternal, dan ada kebutuhan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelatihan lokal.	Rekomendasi DPRD: Percepat program training of trainers (ToT) untuk mengurangi biaya jangka panjang, formalkan pemanfaatan Gedung pelatihan di Tenggarong Seberang, dan susun rencana pelatihan yang hemat biaya disertai indikator hasil sehingga kualitas ASN tetap terjaga meski anggaran terbatas.
---	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan (OPD Pelaksana)	Permasalahan Pokok	Rekomendasi DPRD
1	Kesatuan Bangsa Dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Keterbatasan dukungan eksternal untuk program ormas dan KUB, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena pemangkasan anggaran, dan kebutuhan penguatan pengawasan reaktivasi di kecamatan	Dorong pencarian kemitraan non-APBD (CSR atau mitra strategis) untuk mendukung program ormas dan KUB, jaga alokasi anggaran esensial agar kegiatan reaktivasi dan pembinaan tetap berjalan, dan tingkatkan koordinasi lapangan untuk memastikan program berbasis data menjangkau wilayah seperti Muara Badak.

3. Penutup

Demikian catatan – catatan sebagai masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 untuk perbaikan



dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun – tahun akan datang. Perbaikan, peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara ditahun yang akan datang.

Untuk itu kami berharap kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk meneruskan kepada perangkat daerah terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyempurnaan kinerja pemerintahan dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 27 April 2026

Ketua DPRD Kutai Kartanegara